

SKRIPSI

**PENGAWASAN PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP
PEKERJA *OUTSOURCING* PT PINANG JAYA ABADI DI UNIVERSITAS
ANDALAS**

OLEH:

MUHAMMAD RAYHAN ADITIANA

1610111007

**PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



Pembimbing :

Frenadin Adegustara, SH,MS

Darnis, SH,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

PENGAWASAN PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING* PT PINANG JAYA ABADI DI UNIVERSITAS ANDALAS

(Muhammad Rayhan Aditiana, 1610111007, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Tujuan Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yaitu salah satunya perlindungan Upah yang banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya penentuan Upah Minimum dengan tujuan memberikan penghidupan yang layak. Akan tetapi penerapan Upah Minimum ini harus lah diawasi penerapannya. Dan ini menjadi wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan itu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan pengawasan penerapan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja *outsourcing* PT Pinang Jaya Abadi di Universitas Andalas? 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja *Outsourcing* PT Pinang Jaya Abadi di Universitas Andalas? 3) Bagaimanakah tindak lanjut hasil pengawasan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja *outsourcing* PT Pinang Jaya Abadi di Universitas Andalas?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : *Pertama*, terdapat perusahaan yang melanggar ketentuan Upah Minimum Provinsi, salah satunya adalah PT Pinang Jaya Abadi. *Kedua*, belum dilakukannya pengawasan terhadap PT Pinang Jaya Abadi dikarenakan ada beberapa faktor. *Ketiga*, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan penerapan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja *outsourcing* PT Pinang Jaya Abadi adalah 1) Keterbatasan tenaga pengawas yang hanya berjumlah 19 orang pengawas sedangkan perusahaan yang diawasi ada ribuan perusahaan. 2) PT Pinang Jaya Abadi belum melakukan atau melanggar Wajib Laporan Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Pekerja *Outsourcing*